

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tiongkok merupakan negara yang terletak di kawasan Asia Timur dengan Beijing sebagai ibukota negara. Tiongkok saat ini juga menjadi salah satu negara terluas di kawasan Asia dengan penduduk relatif besar yaitu sekitar 1,4 miliar jiwa. Negara Tiongkok berdiri tahun 1949 dengan usainya Perang Saudara Tiongkok yang dimenangkan oleh pejuang dan pasukan komunis mengakibatkan Tiongkok menjadi negara yang memiliki ideologi politik komunis. Tiongkok ini terus berkembang dengan pesat termasuk perekonomiannya, menjadikan Tiongkok sebagai ekonomi yang terbesar ke 2 di seluruh dunia berdasarkan PDB nominal dengan total sekitar US\$18,321 triliun pada tahun 2022.

Tiongkok pada awal berdirinya menjadi negara sosialis dengan ekonomi terencana terpusat, tetapi saat ini Tiongkok memiliki ekonomi campuran, yang digambarkan oleh pemerintahnya sebagai “Sosialisme dengan karakteristik Tiongkok”. Sejak pada tahun 1978, Tiongkok ini mulai membuka diri kepada dunia dan kemudian mereformasi ekonominya lebih berorientasi terhadap pasar. Hal ini kemudian menjadikan Tiongkok memiliki pertumbuhan PDB rata-rata lebih dari 9 persen per tahun, dan lebih dari 800 juta orang telah berhasil keluar dari kemiskinan. Ada juga peningkatan yang signifikan dalam akses ke kesehatan, pendidikan, dan layanan lainnya selama periode yang sama (World bank).

Tiongkok pada tahun 2013 sejak kepemimpinan Xi Jinping ini memiliki konsep untuk menerapkan kembali konsep “Jalur Sutra” di kebijakan luar negeri yang disebut dengan One Belt, One Road (OBOR) setelah itu diubah menjadi Belt and Road Initiative (BRI). Konsep Jalur Sutra ini sudah ada sejak lama yaitu konsep lama untuk memberi nama jalur-jalur perdagangan antara Tiongkok dengan Eropa, Asia Tengah, Asia Selatan, dan Timur Tengah yang dibangun saat masa Dinasti Kekaisaran Han. Kebijakan Belt and Road Initiative (BRI) yang baru digagas Xi Jinping mempunyai tujuan untuk konektivitas benua Asia, Eropa dan Afrika yang saling berdekatan dan memperkuat pembangunan dan hubungan dengan negara-negara di sepanjang jalur ini. Belt and Road Initiative yang mencakup Asia, Eropa, dan Afrika

ini menghubungkan kawasan ekonomi Asia Timur yang berkembang pesat di satu sisi dan kawasan ekonomi baru Eropa di sisi lain. Proyek ini mencakup negara-negara yang memiliki potensi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang signifikan. Belt and Road Initiative (BRI) ini memiliki 2 jalur yaitu di laut dan di darat. Pada jalur darat lebih berfokus pada pembangunan bersama jembatan darat Eurasia baru dan mengembangkan koridor ekonomi Tiongkok-Mongolia-Rusia, Tiongkok-Asia Tengah-Asia Barat, dan Semenanjung Tiongkok-Indocina dengan memanfaatkan rute transportasi dan kerjasama negara di sepanjang jalur ini. Penekanannya di bidang laut adalah pada kolaborasi untuk membangun jaringan transportasi yang lancar, aman, dan efektif yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan utama di sepanjang jalur Belt and Road Initiative (Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, 2015).

Afghanistan sendiri adalah negara pegunungan yang terkurung daratan di Asia Tengah, berbatasan dengan Iran di barat dan Rusia di utara dan Pakistan di timur dan selatan. Yang dapat dikatakan Secara geografis Afghanistan adalah daerah yang menjadi menghubungkan antara Tiongkok, Asia Tengah, Asia Selatan, dan Timur Tengah. Ibukota dari Afghanistan terletak pada kota Kabul yang juga merupakan kota terbesar di Afghanistan. Keberadaan Afghanistan ini kemudian menarik perhatian Tiongkok.

Di Afghanistan ini ada salah satu kelompok bernama Taliban dan Taliban ini sangat menonjol dan memiliki banyak pengikut. Kelompok Taliban ini berdiri Pada tahun 1994 yang didirikan oleh Mohammed Omar. Taliban ini mempunyai prinsip gerakan politik fundamentalis sunni islam dan memiliki ideologi yang dapat dimaknai sebagai Syariah hukum Islam berdasarkan pada fundamentalisme Deobandi dan Islam militan maupun jihadisme Salafi dari Osama bin Laden (Santoso, 2020). Taliban yang berkuasa di Afghanistan ini cukup mendapat dukungan dari rakyat atau masyarakat Afghanistan lainnya di awal kekuasaannya. Kemudian setelah berkuasa tidak lama, pada tahun 2001 kekuasaan Taliban ini musnah dan digantikan pemerintahan yang lain. Selama tidak berkuasa ini Afghanistan tetap berperang dengan pemerintah Afghanistan yang didukung oleh Amerika Serikat. Taliban terus melakukan serangan selama 20 tahun, menewaskan puluhan ribu pejuang. Dalam beberapa tahun terakhir, kekuatan militer kelompok dan kontrol teritorial telah meningkat. Hal ini juga membuat Amerika Serikat terus menerus mengirimkan pasukan militernya untuk melawan Taliban.

Pada 29 Februari 2020, Amerika Serikat dan Taliban menandatangani Perjanjian Doha, yang menyebabkan penarikan pasukan AS dan Sekutu dari Afghanistan pada 30 Agustus 2021 (U.S. Department of State, 2022). Hal ini membuat Taliban berhasil menguasai Afghanistan yaitu dengan keberhasilannya merebut ibukota Afghanistan, Kabul. Seperti dikutip dari Council on Foreign Relations (CFR) (2021) Setelah Presiden Ghani meninggalkan negara itu, Taliban mengambil alih istana presiden dalam beberapa jam. Para pemimpin Taliban telah mengumumkan niat mereka untuk membentuk “pemerintahan Islam yang terbuka dan inklusif” dan telah menyatakan kesediaan mereka untuk mengadakan pembicaraan dengan para pejabat Afghanistan. Untuk memfasilitasi transisi damai ke pemerintahan Taliban, sebuah dewan dibentuk oleh mantan Presiden Afghanistan Karzai dan Abdullah, mantan kepala eksekutif di bawah Ghani. Pengambilalihan Afghanistan oleh Taliban mengikuti kemajuan pesat, di mana mereka merebut hampir seluruh ibu kota provinsi di negara itu dan menguasai perbatasan. Laporan menunjukkan bahwa pasukan keamanan Afghanistan di beberapa daerah sedang merundingkan penyerahan diri dan menghindari konfrontasi dengan Taliban (CFR, 2021).

Kekuasaan Taliban di Afghanistan ini mendapat banyak reaksi yang beragam dari dunia internasional. Setelah Taliban menguasai Kabul ini banyak negara berkeinginan untuk menarik diplomatnya dari Afghanistan. Sampai saat ini belum ada negara yang mengakui pemerintahan Taliban di Afghanistan secara sah. Tidak banyak yang memberikan dukungan kepada Afghanistan saat ini. Amerika Serikat yang menjadi salah satu negara adidaya juga memberikan sikap setelah Afghanistan di ambil alih oleh Taliban yaitu melakukan sanksi ekonomi kepada Afghanistan (Voanews, 2022). Akan tetapi, kekuasaan Taliban di Afghanistan yang minim akan pengakuan ini juga memiliki indikasi-indikasi respon dukungan dari Tiongkok.

Dukungan Tiongkok terhadap Pemerintahan Taliban di Afghanistan ini tercermin dari pernyataan Menteri Luar Negeri Tiongkok yang menyatakan bahwa “Tiongkok ini tetap berhubungan dengan Taliban setelah Taliban sukses berkuasa di Afghanistan. Tiongkok tetap berkomunikasi berdasarkan rasa hormat sepenuhnya terhadap kedaulatan Afghanistan dan keinginan semua partai politik di negara itu dan terus memainkan perannya dalam mencari solusi politik untuk masalah Afghanistan. Kami berhubungan dan berhubungan.”. Pernyataan ini disampaikan oleh Hua Chunying dari Kementerian Luar Negeri Tiongkok. Komentar Hua

dilihat sebagai tanda terbaru bahwa Tiongkok mendukung Afghanistan di bawah kekuasaan Taliban walaupun tidak secara resmi (Ching, 2021).

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang ada di atas maka rumusan masalah yang dapat diambil yaitu **Mengapa Tiongkok memberikan dukungan ekonomi dan politik terhadap pemerintahan Taliban di Afghanistan?**

C. Kerangka Teoritis

1. Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional merupakan salah satu aspek penting dari kajian politik luar negeri dan telah lama digunakan untuk menggambarkan tujuan suatu negara. Kepentingan nasional dapat menjadi dasar dari orientasi politik luar negeri yang menandakan pedoman dasar dari semua tindakan yang diambil suatu negara terhadap kebijakan luar negerinya. Oleh karena itu, politik luar negeri yang dirumuskan oleh suatu negara dipengaruhi oleh kepentingan nasionalnya. Kepentingan nasional menurut Machiavelli dapat diartikan sebagai tujuan atau keinginan negara di bidang militer, ekonomi, atau budaya. Menurut Hans J. Morgenthau, kepentingan nasional dianggap sebagai upaya negara untuk mengejar kekuasaan (power), yaitu kemampuan untuk melindungi kelangsungan hidup bangsa dalam mempertahankan kedaulatan integritas nasional, sistem pertahanan dan keamanan negara dan ancaman bangsa lain (Mas'ood, 1994).

Konsep kepentingan nasional juga didefinisikan oleh Donald Edwin Nuechterlein (Nuechterlein, 1976) dimana kebutuhan dan keinginan yang dirasakan oleh suatu negara berdaulat dalam kaitannya dengan negara berdaulat lainnya yang terdiri dari lingkungan eksternal. Nuechterlein memaparkan kepentingan nasional dalam empat kategori yaitu :

- a) Kepentingan pertahanan (defense interest): perlindungan negara dan warganya dari ancaman kekerasan fisik yang diarahkan oleh negara lain, dan/atau ancaman yang dari luar terhadap sistem pemerintahannya.
- b) Kepentingan ekonomi (economic interest): peningkatan kesejahteraan ekonomi negara dengan hubungannya terhadap negara-negara lain.

- c) Kepentingan tatanan dunia (world order interest): Mempertahankan sistem politik dan ekonomi internasional dimana negara mungkin merasa aman, dan di mana warga negara dan perdagangannya dapat beroperasi dengan damai di luar perbatasannya.
- d) Kepentingan ideologi (Ideology interest): penjagaan dan kelangsungan nilai-nilai yang dimiliki dan dipertahankan oleh negara dan diyakini sebagai kebaikan bersama.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa politik luar negeri yang dilakukan oleh Tiongkok yaitu mendukung pemerintahan Taliban di Afghanistan dipengaruhi oleh kepentingan nasional Tiongkok. Kepentingan nasional Tiongkok yaitu Tiongkok mendukung pemerintahan Taliban untuk menahan kelompok-kelompok teroris yang ada di Afghanistan dan mencegahnya untuk tidak menyebar sampai ke Tiongkok dan menyerang Tiongkok. Kemudian yang paling dilihat dari dukungan Tiongkok ke pemerintahan Taliban ini adalah dukungan ekonominya dalam hal perdagangan maupun pemanfaatan sumber daya yang sangat menguntungkan Tiongkok untuk terus terlibat dengan Afghanistan dalam jangka waktu yang panjang. Tiongkok juga dapat mempertahankan sistem politik maupun perdagangan di kawasan Asia Selatan dan Asia Tengah dengan mendukung pemerintahan Taliban sehingga Afghanistan terus terlibat dengan proyek-proyek Tiongkok seperti Belt and Road Initiative (BRI).

2. Sphere of influence

Konsep tentang Sphere of Influence telah menjadi topik diskusi yang luas di antara banyak pakar hubungan internasional, khususnya selama periode Perang Dingin. Pada dasarnya, Sphere of Influence berkaitan dengan tradisi geopolitik, yang mengkaji hubungan antara batas wilayah dan kekuasaan politik. Geopolitik dipandang sebagai sarana motivasi politik dan strategi untuk mendapatkan pengaruh. Geopolitik dikembangkan dari pemikiran bahwa geografi memainkan peran penting dalam membentuk sejarah manusia. Berdasarkan landasan ini, geografi memberikan pengaruh dalam tiga bidang utama yaitu yang pertama tentang geografi membentuk identitas, karakter, dan lintasan sejarah suatu bangsa. Kedua, pembangunan sosial, politik, dan ekonomi. Terakhir, menentukan posisi dan peran suatu negara dalam hubungan internasional (Ashari, 2015).

Konsep sphere of influence (lingkup pengaruh) dalam karangan Susanna Hast yang berjudul *Spheres of Influence in International Relations: History, Theory and Politics*. Konsep Sphere of Influence Menurut Susanna Hast sphere of influence adalah: “As a metaphor, sphere of influence attempts to explain a power relation which involves the influencing and the influenced powers, as well as the territories they occupy” (Hast, 2016). Maka dapat dikatakan gagasan mengenai sphere of influence berkaitan dengan dinamika kekuasaan yang dinamis dimana berbagai kekuatan memberikan pengaruh satu sama lain dan wilayah di bawah kendali salah satu kekuatan. Hast mengemukakan bahwa lingkup pengaruh dapat dicapai melalui soft power, artinya bukan lagi tentang menduduki wilayah atau menggunakan kekuatan, melainkan tentang kemampuan untuk mendapatkan kepentingan dengan cara menarik atau mempengaruhi lawan.

Selain itu ada dari Jack C. Plano bahwa “Influence atau Pengaruh” mengacu pada kapasitas pelaku politik untuk mempengaruhi perilaku pelaku lain dengan cara yang sejalan dengan tujuannya. Penerapan pengaruh yang efektif dapat menimbulkan perubahan atau menghalangi perubahan yang tidak diinginkan dalam pola sudut pandang, sikap, keyakinan, atau tindakan lain yang dapat diamati (Plano & Riggs, 1990).

Kapasitas aktor untuk memberikan pengaruh terhadap aktor lain ditentukan oleh berbagai faktor, termasuk kekuatan politiknya, jenis dan luas pengaruh yang mereka gunakan, jangkauan tugas atau dasar kewenangan dan pengaruhnya, daya saing pihak lain yang juga bersaing. Untuk mendapatkan pengaruh, dan terbatasnya efektivitas aktor dalam mengubah perilaku aktor lain. Hal ini disebabkan oleh potensi biaya politik atau faktor-faktor lain yang mungkin menghambat penggunaan kekuasaan oleh seorang aktor. Jack C. Plano juga mencatat bahwa di wilayah yang didominasi oleh kepentingan nasional suatu kekuatan tertentu, yang dikenal sebagai wilayah pengaruh, kekuatan dominan mungkin tidak memiliki otoritas formal atas negara-negara di wilayah tersebut, namun masih dapat memaksa pihak lain untuk mematuhi kepentingan politiknya. Sphere of influence dibentuk melalui perjanjian antara negara-negara dominan dan negara-negara kecil, yang memungkinkan kekuatan dominan untuk menjalankan otoritasnya tanpa melanggar kedaulatan masing-masing negara. Meskipun definisi ini tidak lagi dapat diterapkan sepenuhnya pada kondisi hubungan internasional saat ini, namun definisi ini

masih digunakan untuk menjelaskan kepentingan negara-negara kuat terhadap negara-negara berkembang.

Tiongkok saat ini tengah gencar-gencarnya untuk memperluas pengaruhnya di kawasan Asia lewat Belt and Road Initiative (BRI). Afghanistan yang pada saat dikuasai oleh Taliban ini tidak memiliki kekuatan di dunia internasional dan ditinggalkan banyak negara di dunia termasuk kekuatan besar seperti Amerika Serikat. Tiongkok melihat ini adalah kesempatan baik untuk memperlihatkan kekuatannya dapat mempengaruhi Afghanistan demi kepentingannya sendiri, yang kebetulan juga Afghanistan membutuhkan dukungan Tiongkok. Bantuan Tiongkok kepada Afghanistan disertai dengan kesepakatan-kesepakatan yang dijalin Tiongkok dan Afghanistan ini mencerminkan Tiongkok yang mulai untuk terlibat lebih besar di Afghanistan setelah tidak adanya campur tangan Amerika Serikat. Tiongkok juga melihat ketika Afghanistan sebagai salah satu negara yang cukup strategis untuk mengamankan kekuatan Tiongkok di Asia Tengah.

D. Hipotesis

Tiongkok mendukung Taliban dalam pemerintahan di Afghanistan karena mempunyai kepentingan antara lain memperkuat pengaruh Belt and Road Initiative (BRI) dengan melibatkan Afghanistan dalam Koridor Ekonomi Tiongkok-Pakistan (CPEC), kepentingan investasi pengelolaan sumber daya alam, dan menegaskan kehadiran Tiongkok di kawasan Asia Tengah dan Asia Selatan.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan Tiongkok dalam mendukung pemerintahan Taliban yang telah kembali menguasai Afghanistan pada tahun 2021.

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian yang dipilih adalah penelitian deskripsi kualitatif, yang melibatkan pemeriksaan status atau kondisi sekelompok orang, objek, situasi, sistem berpikir, atau golongan peristiwa yang terjadi saat ini. Menurut Nazir, metode deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan yang sistematis, faktual, dan tepat mengenai ciri-ciri, fakta, dan hubungan antar fenomena yang diteliti. Tujuannya adalah untuk menciptakan ilustrasi atau penggambaran pokok bahasan yang akurat dan komprehensif (Nazir, 2014). Sedangkan, Sugiyono menjelaskan pendekatan penelitian kualitatif berakar pada filosofi post-positivis dan digunakan untuk mengkaji ciri-ciri fenomena alam. Dalam metode ini, peneliti memegang peranan sentral, dan teknik pengumpulan data dipadukan dengan triangulasi. Analisis data yang dihasilkan bersifat induktif dan kualitatif, serta penekanannya pada generalisasi. (Sugiyono., 2019).

Maka metode ini menekankan proses penelitian pada deskripsi tentang suatu fenomena. Kemudian menggunakan teknik pengumpulan data yang meliputi data sekunder. Pengolahan data sekunder meliputi studi pustaka dari berbagai tulisan. Sumber tulisan tersebut terdiri dari penelitian yang berkaitan seperti buku, jurnal, artikel, dan sebagainya.

G. Sistematika Penulisan

BAB I

BAB I terdiri dari pendahuluan. Di dalam pendahuluan terdapat latar belakang yang membahas tentang identitas negara Afghanistan dan Taliban di Afghanistan. Kemudian rumusan masalah sebagai fokus pembatas kajian penelitian ini. Untuk menganalisa masalah secara ilmiah, maka peneliti menggunakan kerangka berpikir. Selanjutnya adalah hipotesis, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II

Pada BAB II akan membahas dan menjelaskan tentang dinamika politik luar negeri Tiongkok mulai dari prinsip politik luar negerinya, politik luar negeri Tiongkok dari masa ke masa, politik luar negeri terkait Belt and Road Initiative (BRI), dan dinamika hubungan Tiongkok dan Afghanistan.

BB III

Pada BAB III akan menjelaskan proses dan hasil analisis penulis tentang alasan Tiongkok memberikan dukungan kepada pemerintah Taliban di Afghanistan. Dalam bab ini akan dipaparkan kepentingan-kepentingan atau motif Tiongkok yang menjadikan pengambilan keputusan luar negeri Tiongkok ini mendukung Taliban di Afghanistan.

BAB IV

Pada BAB IV adalah penutup yang berisi kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan merupakan bagian akhir dari penulisan penelitian ini.